

BAB 1

PENDAHULUAN

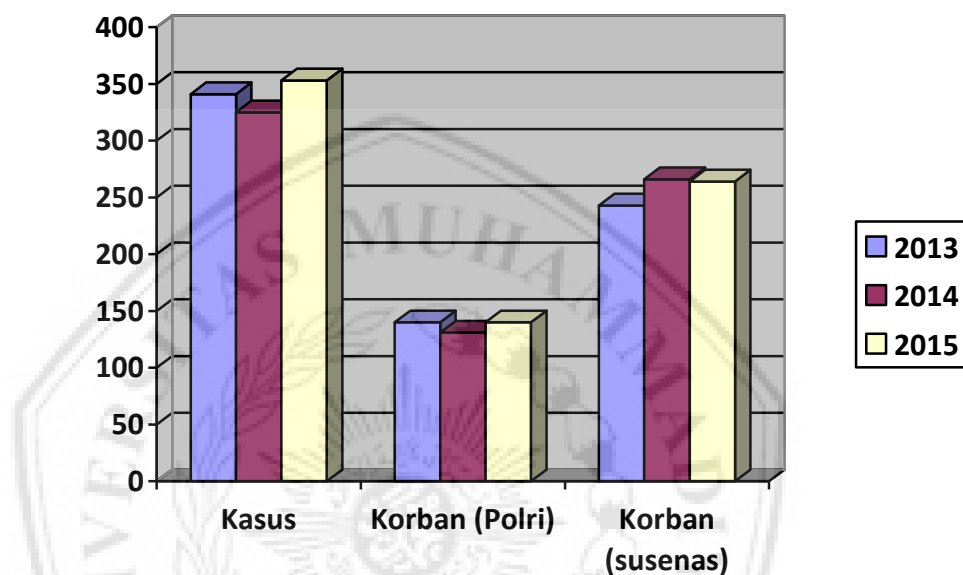
A. Latar Belakang

Perkembangan dunia komunikasi saat ini mengharuskan setiap orang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu perkembangan yang saat ini marak adalah teknologi komunikasi melalui internet. Melalui jaringan internet banyak hal dapat dilakukan, baik itu hal positif maupun hal negative. Oleh karena itu melalui internet pula para oknum yang tidak bertanggungjawab menggunakan media ini untuk melakukan hal yang merugikan orang lain. Salah satu tindakan yang paling fatal adalah tindakan kejahatan.

Tingkat kriminalitas ini dapat dilihat dalam data Publikasi Statistik Kriminal tahun 2016, dimana data tersebut berasal dari dua sumber yakni data berbasis registrasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dua data berbasis survei yaitu data Kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Statistik Potensi Dasar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2013-2015 cenderung berfluktuatif, jumlah kejadian kejahatan dari sekitar 341 ribu kasus pada tahun 2013 menurun menjadi

sekitar 325 ribu kasus pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 353 ribu kasus ¹.

Gambar 1.1
Jumlah Kejahatan (*crime Total*) kasus dan korban
Tahun 2013-2015



Sejalan dengan resiko penduduk yang terkena kejahatan, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk diperkirakan sebanyak 140 orang pada tahun 2013, 131 orang pada tahun 2014, dan 140 orang pada tahun 2015. Data survei sosial ekonomi nasional menggambarkan jumlah dan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Indonesia yaitu sekitar 2,43 juta orang pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 2,66 juta orang di tahun 2014 dan menjadi sekitar 2,64 juta orang di tahun 2015. Data Statistik Potensi Desa mengungkapkan bahwa selama periode tahun

¹ Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. 2006. *Statistik Kriminal*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, hal 4

2008-2014 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.300 desa pada tahun 2008 menjadi sekitar 2.500 desa/kelurahan pada tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014 ².

Teknologi jaringan komputer dewasa ini memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan guna menunjang setiap aktifitas kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting.³ Selain sebagai penyedia layanan informasi, internet merupakan sarana komunikasi sosial di seluruh penjuru dunia. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia dapat diketahui beroperasi selama 24 jam.

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global di mana sekat-sekat Negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-paltikultural menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.

Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. *cyberspace* adalah sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang seringkali dipakai untuk kebutuhan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). *Cyber space* berasal

² ibid

³ Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, hal.1

dari istilah bahasa Indonesia yaitu dunia maya yang secara terminology menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuknya virtual.

Internet atau *cyber space* telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.

Internet telah membuat manusia-manusia (sebagai pengguna) mampu menjelajah ruang maya ke mana-mana, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkerama, berdialog, dan mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia⁴

Segi positif dari dunia *cyber* ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Banyak sekali manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan dengan adanya *cyber space*, contohnya saja ketika hendak melakukan transaksi perbankan di manapun dan dengan kondisi apapun dengan *e-banking*, kemudian ketika melakukan pembelian maupun penjualan barang *e-commerce* dan mencari referensi atau

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung : Refika Aditama. Hal. 33

informasi mengenai ilmu pengetahuan dengan adanya *e-library* serta banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet.

Selain dampak positif yang telah penulis jelaskan sebelumnya, teknologi internet juga membawa dampak negatif. Kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini melalui internet dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online. Kejahatan yang dilakukan individu maupun kelompok secara online pada dasarnya memiliki resiko tertangkap yang sangat minim, ditambah lagi dengan akibat kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun Negara.

Kemajuan teknologi dan industry yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negative terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negative yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.

Salah satu kejahatan dunia maya yang saat ini sering terjadi adalah *cyber bullying*, yaitu salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui

dunia *cyber*. Perilaku *cyber bullying* di Indonesia sebenarnya adalah masalah baru seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk mengangkat masalah ini sehingga kasus *cyber bullying* ini juga tidak dapat terungkap kepermukaan seluruhnya, padahal dampak kasus ini cukup berbahaya. Akibat dari intimidasi tersebut memiliki akibat yang fatal jika dilakukan secara terus menerus, tidak jarang bahwa kematian menjadi akhir dari kejahatan *cyber bullying*.

Cyber Bullying berasal dari pengertian *cyber* dan *bullying*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), "*cyber*" yang berarti "maya" didefinisikan sebagai perbuatan yang tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Sedangkan "*bully*" berarti perbuatan yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah. *Bullying* mencakup sejumlah perlakuan kasar dan juga kejam serta ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu secara sengaja dan berulang-ulang untuk melukai, merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan sehingga membuat orang lain merasa lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya *Cyber Bullying* adalah bentuk *bullying* yang menggunakan alat-alat bantu seperti Telepon Genggam, Klip Gambar/Video, E-mail, Website dan Game online. Selain alat bantu, terdapat sarana lain yang digunakan sebagai media kejahatan *Cyber Bullying*, yakni media sosial yang sering dijadikan tempat untuk melakukan *cyberbullying*; contohnya seperti *Twitter*, *Instagram*, *Path*, *Ask.fm*, *Facebook*

dan sebagainya. Dengan adanya kejahatan baru di dunia maya maka memunculkan adanya *cybercrime*.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri apabila dalam sebuah kejahatan dunia maya memunculkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yang dimaksudkan adalah memasuki computer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik materiil ditunjukkan adanya kerugian yang dirasakan orang lain akibat kejahatan tersebut.

Beberapa contoh tindak pidana pelecehan di dunia maya yang terjadi diantaranya :

1. Korban bernama Amanda Michelle Todd berusia 15 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya, kawasan Vancouver, Kanada tanggal 10 Oktober 2012. Lima minggu sebelum dirinya bunuh diri. Ia menceritakan dirinya dilecehkan dan diintimidasi akibat gambar bagian tubuhnya disebar melalui sosial media oleh orang yang tidak dikenalnya. Akibatnya Amanda dijauhi teman-teman sekelasnya bahkan pernah dipukuli oleh sekelompok remaja di depan sekolah barunya dan insiden tersebut direkam. Saat itu Amanda merasa putus asa dan bunuh diri dengan obat pemutih pakaian ⁵.
2. Kasus *bullying* di Indonesia juga pernah terjadi menimpa Sonya Depari Sembiring pada awal April 2016. Kasus berawal dari sikap arogan saat ditilang Polisi Wanita (Polwan) saat konvoi UN. Sonya bersikap membentak-bentak polwan Ipda Perida Panjaitan saat menindak mobil

⁵ <http://www.beritasatu.com/dunia/77339-tak-tahan-di-bully-seorang-remaja-putri-bunuh-diri.html> diakses 13 April 2018

yang ditumpangnya melintas dengan pintu terbuka. Cacian, ejekan, dan nyinyiran langsung mengarah pada sonya. Akibatnya sonya harus kehilangan ayah kandungnya akibat tidak kuat karena anaknya menjadi bahan *bullying*.

3. Kasus *bullying* selanjutnya yaitu akibat penghinaan lambang Negara yang dialami oleh Zaskia Gotik. Berawal dari sebuah candaan dengan menyebut Hari Proklamasi Indonesia jatuh pada tanggal 32 Agustus, Zaskia juga mengatakan bahwa lambang sila kelima ialah “bebek nungging”. Padahal ketentuan larangan penghinaan Negara telah diatur secara jelas dalam pasal 24 UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 57 a junto pasal 68 berbunyi, “setiap orang dilarang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang Negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang Negara dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta”. Akibat dari perbuatannya Zaskia pun harus rela menerima cacian dari public dan juga harus berurusan dengan hukum⁶.
4. Kasus *bullying* lain yang terjadi kepada Florence Sihombing yang melecehkan Kota Jogjakarta. Florence membuat kegaduhan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Baciro, Jogjakarta pada rabu 27 Agustus 2014. Wanita ini mengungkapkan kemarahannya lewat akun path miliknya dengan kalimat memaki maki kota terpelajar tersebut

⁶ <http://www.Detik.com/contoh-kasus-cyberbullying.html> , diakses 14 April 2018

dengan kata-kata “jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya”. Akibat ungghahan tersebut berbagai kicauan umpatan dilontarkan pada gadis 26 tahun tersebut⁷.

5. Kasus *bullying* pernah terjadi pula di Kota Bandung yang mengakibatkan penganiayaan pada korbannya. Kasus penganiayaan ini terjadi pada seorang mahasiswi yang dianiaya oleh teman-temannya sendiri. Tindakan penganiayaan itu tidak lain disebabkan dari buntut dari saling *bully* antara korban dan pelaku. Pelaku yang tidak terima *dibully*, lalu menganiaya korban hingga kasus ini ditangani oleh pihak Kepolisian⁸

Pelecehan atau penghinaan di dunia maya telah terbukti dapat sangat menyinggung hati yang juga berdampak pada keadaan psikis seseorang, tidak hanya itu perbuatan *bullying* juga menimbulkan hal-hal negative lainnya seperti perkara yang sampai dibawa ke ranah hukum. Biasanya dalam kejahatan ini, penguntit menggunakan kata-kata sensitive yang ditujukan kepada korban dengan tujuan hendak menyakiti dan mengganggu mental korban tersebut. Kejahatan tersebut dapat terjadi kapanpun dan dimanapun selama korban dan pelaku terhubung dengan internet. Walaupun kebanyakan orang tak menyadari bahwa tindakan yang di lakukannya adalah sebagai tindakan hukum yang berbahaya, ada pula orang yang melakukan tindak *cyberbullying* yang benar-benar disengaja untuk dilakukan. Sifat ini dapat berupa impersonal teks, komentar yang diposting di Internet dan bentuk lain dari komunikasi online.

⁷ <http://www.liputan6.com/jangan-membully.html>, diakses 14 April 2018

⁸ <http://www.Kompas.com/jangan-membully.html>, diakses 15 April 2018

Cyber Bullying adalah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu *cyber crime* di Indonesia yang perlu membutuhkan perhatian khusus. Alasannya antara lain yaitu yang pertama, karena kejahatan (*crime*) merupakan portret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak, telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat, bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Kedua, cyber crime dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau *cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*.

Ketiga, cyber crime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan kehidupan individu, masyarakat, dan Negara. Jenis kejahatan ini (*cyber crime*) tidak tepat jika disebut sebagai “*crime without victim*”, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun public. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan hilang/ rusak akibat ulah segelintir orang atau beberapa

oaring yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam *cyber crime*.

Keempat, *cyber crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan kemampuan individu, masyarakat, Negara, dan tatanan kehidupan global, karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan, kemampuan, keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet dapat terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya, seseorang juga dapat dengan mudah menjadi penjahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti kepada pengaruh kriminalitas dan disnormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.

Kelima, korban dari kejahatan ruang maya (*cyber crime*) semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjaga penjahat di jagad maya ini. Hal ini menjadi suatu bukti, bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum dalam realitasnya, tindak kejahatan ini sudah demikian maju yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparat-aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

Dalam kejahatan dunia maya atau yang sering disebut sebagai *cyber bullying* memang tidak terlepas dari adanya dua subjek yang saling berkaitan, yakni pelaku dan korban. Dalam peraturan Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan elektronik serta kejahatan pencemaran nama baik masih berfokus terhadap bagaimana menerapkan hukuman yang adil terhadap pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan untuk pengaturan yang terkait bagaimana perlindungan korban kejahatan dunia maya masih belum diatur secara lengkap.

Meski tidak secara spesifik mengatur *cyber bullying*, aturan terkait hal ini masih terakomodasi secara umum di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang dalam di dalam UU ITE yang terkait dengan *cyber bullying* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29. Pasal-pasal tersebut berisi tentang larangan pendistribusian dan pentransmisian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perbuatan kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman. *Cyber Bullying* sebagai kejahatan yang tergolong dalam delik aduan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, hal ini berarti perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang-orang yang merasa dihina.

Adapun peraturan tentang “muatan menghina dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang penghinaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Selain pasal-pasal di atas, regulasi mengenai perlindungan terhadap *cyber bullying* telah dirumuskan secara umum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Ketentuan *cyber bullying* yang diatur dalam produk hukum yakni peraturan perundang-undangan di Indonesia juga termuat dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ketentuan tersebut mengatur mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan korban guna melaporkan pelaku yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadapnya. Bukan hanya korban yang dapat mengadukan tindakan *cyber bullying* namun pihak lain berhak melakukan pelaporan ketika melihat orang lain menjadi korban *pembullying*. Dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau, menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”

Negara merupakan “kesatuan wilayah” karena wilayah bagi sebuah Negara merupakan unsur metlak sekaligus tempat bermukimnya penduduk⁹. Negara merupakan wadah yang dipergunakan manusia dalam mewujudkan interaksinya satu sama lain sangat beragam, mulai dari yang kecil, yaitu keluarga hingga yang paling besar yaitu bangsa. Ketika suatu Negara mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya, artinya Negara tersebut telah memiliki sebuah “kedaulatan wilayah” (*Territorial Sovereignty*), yaitu otoritas khusus untuk melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest authority*)¹⁰ yang merdeka (*independence*) dan bebas (*independent*) dari pengaruh kekuasaan asing (atau Negara lain, khusus untuk wilayahnya. Guna menjamin kesinambungan antara pelaksanaan perintah dan kekuasaan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya serta menjaga keseimbangan hubungan kepentingan di wilayahnya, Negara memerlukan suatu instrument/ sarana yang dimaksud adalah hukum. hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

Secara garis besar terdapat Sembilan teori mengenai asal mula terbentuknya Negara yakni teori perjanjian masyarakat, teori keTuhanan, teori kekuatan, teori Patriarkhal atau Matriarkhal, Teori Organik, Teori Daluwarsa,

⁹ Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers. hal 3

¹⁰ Hans Kelsen dan Robert, 1967. *Principles of Internasional Law*. New York-Chicago-San Francisco-Toronto-London : Holt Inc. Hal 189

Teori Alamiah, Teori Idealis, dan Teori Historis. Walaupun demikian terdapat benang merah yang menghubungkan kesembilan teori tersebut, yaitu tidak akan ada suatu Negara yang akan terbentuk apabila tidak ada kelompok masyarakat untuk dipimpin. Dengan berbekal pemikiran inilah, kelompok masyarakat tersebut menunjuk seorang atau sekelompok orang untuk memimpin mereka serta mengadakan aturan-aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan mereka, serta memelihara keamanan dan ketertiban-ketertiban mereka.

Pentingnya sebuah perlindungan khususnya terhadap korban *cyber bullying* adalah dalam rangka mendapatkan hak-hak individu dan personal mereka untuk hidup secara aman, tenteram tanpa mendapatkan gangguan dari pihak luar. Namun perlindungan yang dimaksud tidak akan terwujud apabila tidak ada pendukung regulasi serta lemahnya peran para aparat penegak hukum.

Pemahaman mendalam berkaitan dengan batasan-batasan yang dapat disebut sebagai korban *cyber bullying* perlu dilakukan agar menemukan kesatuan pemahaman bahwa tidak semua perbuatan yang dilakukan dalam dunia maya memiliki dampak buruk bagi setiap orang. Hanya perbuatan-perbuatan yang merugikan terhadap korbanlah yang dapat diancam pidana.

Untuk itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan dalam latar belakang terkait korban *cyber bullying* beserta perlindungan yang dapat diberikan. Oleh karenanya demi menjawab persoalan tersebut penulis menetapkan judul: **“Tinjauan Yuridis**

Perlindungan Korban terhadap Kejahatan *Cyber Bullying* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud korban dalam kejahatan *cyber bullying* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* dalam peraturan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan korban *cyber bullying* serta apa saja batasannya
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* berdasarkan ketentuan peraturan hukum di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai perlindungan korban terhadap kejahatan *cyber bullying* dalam sistem hukum pidana di indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perlindungan korban terhadap kejahatan *cyber bullying* dalam sistem hukum pidana di indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.¹¹ Suatu metode penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan kata lain menggunakan pendekatan Undang-undang yang digunakan dengan menelaah suatu regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti¹². Dalam hal ini penulis mengambil kasus mengenai Perlindungan

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta. hal. 15

¹² Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.102

Korban Kejahatan *Cyber Bullying* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, ialah semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, undang-undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, ialah data yang mendukung bahan hukum primer yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat sarjana, dan penelitian terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan bahan, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian

bahan hukum melalui browsing internet yang terkait dengan kumpulan subjek dan obyek penyelesaian kajian normatif terhadap perlindungan korban kejahatan *cyber bullying* dalam sistem hukum pidana di indonesia.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa bahan hukum adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian yaitu menguraikan dan memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis bahan yang digunakan adalah dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam Undang-undang. Kemudian mendiskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang ditemukan untuk menemukan penyelesaian mengenai perlindungan korban kejahatan *cyber bullying* dalam sistem hukum pidana di indonesia.

Data yang dianalisa secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan data. Selanjutnya semua data diseleksi dan ditolak kemudian dinyatakan secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, yakni memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang berfokus dan spesifik terhadap masalah yang dibahas serta merupakan dasar pemilihan judul. Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan secara teoritis dan praktis. Metode penulisan, yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan, jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan dan teknik analisa bahan serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menyangkut batasan-batasan tentang siapa yang disebut sebagai korban *cyber bullying* dan mengenai perlindungan korban kejahatan *cyber bullying* dalam sistem hukum pidana di indonesia.

Bab III : isi dari pada Bab ini adalah bahwa penulis akan menjawab, menguraikan, dan menganalisis secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang berkenaan dengan penjelasan dan batasan apa yang dimaksud dengan korban kejahatan *cyber bullying* serta tinjauan yuridis perlindungan korban kejahatan *cyber bullying* dalam produk hukum di Indonesia.

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

